

LAPORAN BULANAN BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT

**JANUARI
2025**



badankeuanganprovntt@gmail.com



www.reallygreatsite.com



KATA PENGANTAR

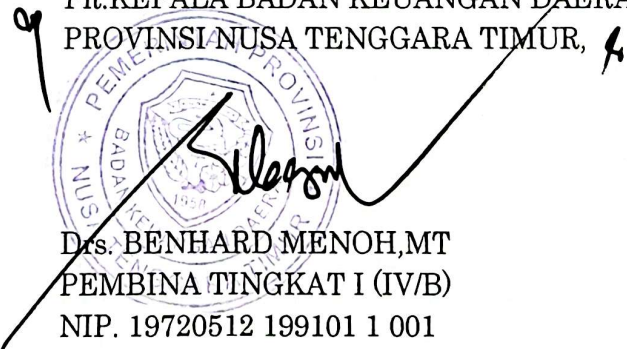
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih Karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Bulan Januari Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

Melalui Laporan Kinerja Bulanan Badan Keuangan Daerah ini diharapkan dapat mencerminkan kinerja Badan Keuangan Daerah selama Bulan Januari Tahun 2025, sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang berminat untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah.

Kami menyadari benar akan segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan program pemerintah dimaksud. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan terbuka.

Kupang, Februari 2025

Plt.KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. BENHARD MENO, MT
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 19720512 199101 1 001

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Organisasi dan Personalia	3
1.5 Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan Daerah	7
2.2 Target Kinerja.....	8
2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2024.....	10
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	17
3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	17
A. Pelayanan Administrasi dan Umum.....	17
B. Kepegawaian	18
3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	20
A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah.....	20
1. Realisasi Pendapatan	20
2. Realisasi Belanja	26
B. Kinerja Badan Keuangan Daerah.....	32
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	37
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Permasalahan dan Solusi	59
1. Sekretariat	59
2. Anggaran	60
3. Bidang Perbendaharaan	61
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan	61
4. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	61
BAB IV PENUTUP	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	5
---	---

DAFTAR TABEL

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Keuangan Daerah	8
2.2 Penganggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2024	10
3.1 Rekapitulasi Surat Masuk	17
3.2 Rekapitulasi Surat Keluar	17
3.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional.....	18
3.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan	18
3.5 Komposisi Pegawai berdasarkan Agama.....	19
3.6 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Umum.....	19
3.7 Komposisi Tenaga Kontrak	20
3.8 Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan.....	20
3.9 Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah.....	26
3.10 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Anggaran.....	38
3.11 Hasil Pelaksanaa Tugas Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.....	40
3.12 Hasil Pelaksanaa Tugas Bidang Perbendaharaan.....	47
3.13 Hasil Pelaksanaan Tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan Pemerintah daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT pada Bulan Januari Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan berbagai program kegiatan dan berbagai program kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud agar seluruh rencana program dan kegiatan dapat terealisasi, terarah dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Bulan Januari 2025 maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Bulan Januari Tahun Anggaran 2025 yang diharapkan dapat menjadi informasi tentang kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan Akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Badan Keuangan Daerah dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang keuangan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810)
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
 - j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006).

1. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024).

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Bulan Januari Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Kinerja Bulan Januari Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan dasar evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang guna peningkatan kinerja.

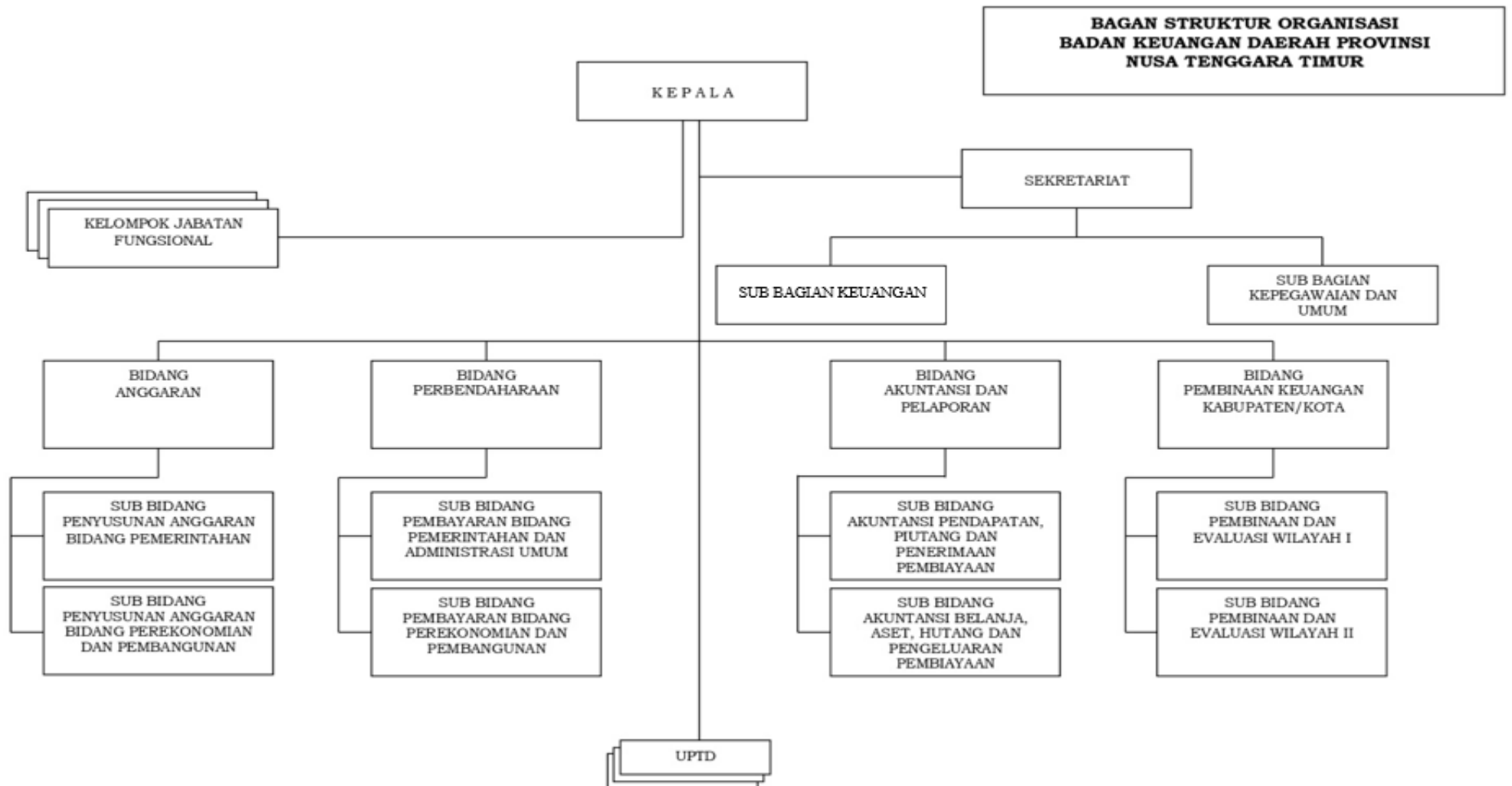
1.4 Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :

- 1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
- 2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
- e. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.

Gambar 1.1



1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Kinerja Bulan Januari Tahun Anggaran 2025 ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Bulan Januari Tahun Anggaran 2025. Membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir dimaksud, sistematika penyajian Laporan Kinerja Bulan Januari Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Organisasi dan Personalia
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
- 2.2 Target Kinerja

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- 4.1 Permasalahan
- 4.2 Solusi

BAB V PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Target Kinerja

Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk mewujudkan manajemen target kinerja jangka menengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN KEUANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan	100 %
		2. Persentase Renperda APBD Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Tepat Waktu	100 %

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
a.	Belanja (Program)	Rp. 781.634.764.109,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 18.188.331.972.-	Realisasi minimal 90%
	2. Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 763.446.432.137,-	Realisasi minimal 85%
b.	Pendapatan	Rp. 3.416.155.613.857,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan (APBD)	Rp. 4.197.790.377.966,-	Realisasi minimal 90%

2.	APBN		
a.	Program Dekonsentrasi	Rp. -	-
	1. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. -	-
	2. Bina Administrasi Kewilayahan	Rp. -	-
b.	Program Tugas Pembantuan	Rp. -	-
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. -	-

2.3 Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah TA. 2025

Berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025, penganggaran Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025

						KEUANGAN	781.634.764.109
0	0	0	2			Badan Keuangan Daerah	781.634.764.109
0	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.188.331.972
1	1	0	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	409.894.096
1	1	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.246.000
1	1	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	91.310.800
1	1	0	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.903.727
1	1	0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.433.569
1	1	0	1	0	8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000
1	1	0	1	1	0	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000
1	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.562.328.600
1	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.070.629.000
1	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600
1	1	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000
1	1	0	2	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000
1	1	0	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.423.000

1	1	0	2	0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	65.519.000
1	1	0	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.509.000
1	1	0	2	0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000
1	1	0	3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000
1	1	0	3	0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000
1	1	0	3	0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
1	1	0	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.843.000
1	1	0	5	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	141.079.000
1	1	0	5	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000
1	1	0	5	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
1	1	0	5	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.685.000
1	1	0	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.600.775.956
1	1	0	6	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.079.000
1	1	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.189.000
1	1	0	6	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.243.520
1	1	0	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.500.000
1	1	0	6	0	7	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000
1	1	0	6	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	454.729.000
1	1	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.129.000

1	1	0	6	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436
1	1	0	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.824.000
1	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	38.824.000
1	1	0	7	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.000.000
1	1	0	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.723.846.320
1	1	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400
1	1	0	8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780.000.000
1	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.907.280.920
1	1	0	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.820.000
1	1	0	9	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000
1	1	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000
1	1	0	9	0	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000
0	2					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	763.446.432.137
2	2	0	1			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	11.036.154.325
2	2	0	1	0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	473.651.000
2	2	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	516.447.000
2	2	0	1	0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	159.014.000
2	2	0	1	0	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	367.722.800
2	2	0	1	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.049.323.362

2	2	0	1	0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.025.873.200
2	2	0	1	0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3.444.122.963
2	2	0	2			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.272.027.005
2	2	0	2	0	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1.000.000
2	2	0	2	0	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.038.000
2	2	0	2	0	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.568.000
2	2	0	2	0	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	452.694.000
2	2	0	2	0	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	732.006.500
2	2	0	2	0	6	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	1.000.000
2	2	0	2	0	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	110.170.000
2	2	0	2	0	8	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1.000.000
2	2	0	2	0	9	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	1.000.000

						Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	
2	2	0	2	0	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1.000.000
2	2	0	2	0	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000
2	2	0	2	0	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	101.550.505
2	2	0	3			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.382.903.796
2	2	0	3	0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	433.044.296
2	2	0	3	0	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	322.607.600
2	2	0	3	0	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	404.848.400
2	2	0	3	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	631.832.200
2	2	0	3	0	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	589.571.300

2	2	0	3	0	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1.000.000
2	2	0	4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.671.638.502
2	2	0	4	0	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1.000.000
2	2	0	4	0	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	330.735.212
2	2	0	4	0	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	560.726.990
2	2	0	4	0	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	770.670.000
2	2	0	4	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.006.506.300
2	2	0	4	0	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1.000.000
2	2	0	4	0	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	1.000.000
2	2	0	5			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	745.083.708.509
2	2	0	5	0	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	47.206.923.484
2	2	0	5	0	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	46.356.898.400

2	2	0	5	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	22.180.954.686
2	2	0	5	0	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	629.338.931.939

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

A. Pelayanan Administrasi dan Umum

1. Surat Masuk

Tabel 3.1
Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
Per 31 Januari 2025

Unit	Jumlah Surat Masuk
Sekretariat	83
Bidang Anggaran	70
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	59
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	16
Bidang Perbendaharaan	98
Jumlah	326

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Surat Keluar

Tabel 3.2
Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
31 Januari 2025

Unit	Jumlah Surat Keluar
Sekretariat	67
Bidang Anggaran	7
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	17
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	10
Bidang Perbendaharaan	59
Jumlah	160

Sumber : Sekretariat Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

B. Kepegawaian

Keadaan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 64 orang, dengan perincian sebagai berikut (sampai dengan 31 Januari 2025).

1. Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Tabel 3.3

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Kondisi 31 Januari 2025

NO	JABATAN	JUMLAH	TINGKATAN (eselon/ jenjang)	Ket
1.	Kepala Badan	0 orang	II-a	Tidak Ada
2.	Sekretaris	0 orang	III-a	Tidak Ada
3.	Kepala Bidang	3 orang	III-a	Ada
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	9 orang	IV-a	Ada
5.	Fungsional Tertentu	8 orang		Ada
6	Pelaksana	43 orang		
Total		64 orang		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Tabel 3.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Kondisi 31 Januari 2025

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			
		L	P	I	II	III	IV
1.	Sekretariat	6	7	-	1	11	1
2.	Bidang Anggaran	7	4	-	-	8	3
3.	Bidang Perbendaharaan	3	10	-	-	13	0
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	3	10	-	-	11	3
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	8	6	-	1	10	2
Jumlah		27	37		2	53	9
Total		64		64			

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3. Berdasarkan Agama

Tabel 3.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama
Kondisi 31 Januari 2025

NO	UNIT KERJA	AGAMA				
		KP	KK	Islam	Hindu	Budha
1.	Sekretariat	6	6	1	-	-
2.	Bidang Anggaran	5	6	-	-	-
3.	Bidang Perbendaharaan	6	6	1	-	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	6	7	1	-	-
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	10	1	1	1	-
<i>Jumlah</i>		33	26	4	1	-
Total		64				

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

4. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum
Kondisi 31 Januari 2025

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	D.I II/ III	D.IV	S1	S2
1.	Sekretariat	-	-	2	-	1	8	2
2.	Bidang Anggaran	-	-	-	1	-	7	3
3.	Bidang Perbendaharaan	-	-	-	3	-	9	1
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	1	-	7	6
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	3	-	1	5	4
<i>Jumlah</i>		-	-	5	5	2	36	16
Total		64						

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

5. Tenaga Kontrak

Tabel 3.7.
Komposisi Tenaga Kontrak Daerah
Kondisi 31 Januari 2025

NO	TENAGA KONTRAK	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	38
2	PEREMPUAN	30
Total		68 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

A. Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan Daerah

1. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2025, Target Pendapatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebesar **Rp. 3.416.135.171.857,-**. Berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah kondisi 31 Januari 2025:

Tabel. 3.8
Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah
Kondisi 31 Januari 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.416.135.171.857	503.830.649.763	14,75
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	119.519.178.857	1.153.242.663	2,02
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	62.519.178.857		
4.1.03.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal	62.519.178.857		

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	pada BUMN			
4.1.03.01.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	62.250.000.000		
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	269.178.857		
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	57.000.000.000	1.153.242.663	2,02
4.1.04.05.	Jasa Giro	5.000.000.000	292.809.218	5,86
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000	292.809.218	5,86
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000	292.809.218	5,86
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	1.000.000.000		
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000		
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000		
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	30.000.000.000	121.918.323	0,41
4.1.04.08.01.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	30.000.000.000	121.918.323	0,41
4.1.04.08.01.0001.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	30.000.000.000	121.918.323	0,41
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000	100.516.595	1,01

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000	100.516.595	1,01
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000	100.516.595	1,01
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	11.000.000.000	637.998.527	5,80
4.1.04.15.01.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN	1.000.000.000		
4.1.04.15.01.0001.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji pokok ASN	1.000.000.000,		
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja tunjangan pph/tunjangan khusus /tunjangan PPPK			
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan belanja tunjangan pph/tunjangan khusus /tunjangan PPPK			
4.1.04.15.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	10.000.000.000	637.998.527	6,38
4.1.04.15.04.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000.000	637.998.527	6,38
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.296.615.993.000	502.571.332.100	15,25
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.615.993.000	502.571.332.100	15,25
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	3.296.615.993.000	502.571.332.100	15,25

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	61.631.985.000	157.332.600	0,26
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.059.812.000		
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	48.258.335.000		
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.760.954.000		
4.2.01.01.01.0007.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.064.825.000	104.682.500	9,83
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	397.747.000	39.774.700	10,00
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	90.312.000	12.875.400	14,26
4.2.01.01.02.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.132.047.308.000	257.144.420.000	12,06
4.2.01.01.02.0001.	DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.542.866.521.000	257.144.420.000	16,67
4.2.01.01.02.0004	DAU tambahan dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK			
4.2.01.01.02.0005	DAU yg ditentukan penggunaannya bidang Pendidikan	445.245.671.000		
4.2.01.01.02.0006	DAU yg ditentukan penggunaannya bidang Kesehatan	41.141.397.000		
4.2.01.01.02.0007	DAU yg ditentukan penggunaannya bidang Pekerjaan Umum	102.793.719.000		
4.2.01.01.03.	DANA ALOKASI KHUSUS	133.541.747.000		
4.2.01.01.03.0004.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMA	133.541.747.000		
4.2.01.01.03.0005.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SLB			
4.2.01.01.03.0051	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMK			

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler Penguatan stunting			
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB -Reguler Penguatan Kesehatan			
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah -penugasan- pembangunan sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM			
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik Bidang Pertanian Penugasan/Renovasi sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian			
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan			
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan			
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik Bidang Jalan-Penugasan			
4.2.01.01.03.0036	DAK Fisik-Bidang jalan-penugasan Keselamatan jalan			
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang irigasi penugasan			
4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan Kehutanan			
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan Penugasan			
4.2.01.01.03.0065	DAK Fisik-Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan			
4.2.01.01.04.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	962.694.182.000	245.269.579.500	25,48
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	962.694.182.000	245.269.579.500	25,48

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja			
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD			
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD			
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD			
4.2.01.01.04.0009.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum			
4.2.01.01.04.0010.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya			
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS			
4.2.01.01.04.0022	Dana Pelayanan Perlindungan Anak			
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM			
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM			
4.2.01.06.01.0001.	DANA INSENTIF FISKAL	6.700.771.000		
4.2.01.06.01.0001.	Dana Insentif Fiskal	6.700.771.000		
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		106.075.000	
4.3.01.	Pendapatan Hibah		106.075.000	
4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		106.075.000	
4.3.01.04.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Dalam Negeri		106.075.000	

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.3.01.03.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan		106.075.000	

Sumber Bidang Perbendaharaan (BUD)

2. Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.03.0000/001/2025, Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 781.634.764.109,-** Pagu dan Realisasi Anggaran tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah
Kondisi 31 Januari 2025

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						KEUANGAN	781.634.764.109	470.433.754	0,06%
0	0	0	2			Badan Keuangan Daerah	781.634.764.109	470.433.754	0,06%
0	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.188.331.972	242.993.454	1,34%
1	1	0	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	409.894.096	13.280.000	3,24%
1	1	0	1	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.246.000	12.968.000	19,88%
1	1	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	91.310.800		0,00%
1	1	0	1	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.903.727	312.000	0,41%
1	1	0	1	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.433.569		0,00%
1	1	0	1	0	8	Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah	50.000.000		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	1	0	10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000		0,00%
1	1	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.562.328.600	40.822.500	0,35%
1	1	0	2	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.070.629.000		0,00%
1	1	0	2	0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600		0,00%
1	1	0	2	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000	8.350.000	5,57%
1	1	0	2	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.330.000		0,00%
1	1	0	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.423.000	14.954.000	26,98%
1	1	0	2	0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	65.519.000	17.518.500	26,74%
1	1	0	2	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	75.509.000		0,00%
1	1	0	2	0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.312.000		0,00%
1	1	0	3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	4.264.000	21,32%
1	1	0	3	0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000		0,00%
1	1	0	3	0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000		0,00%
1	1	0	5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.843.000	18.555.800	5,53%
1	1	0	5	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	141.079.000	12.761.600	9,05%
1	1	0	5	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000	5.794.200	6,36%
1	1	0	5	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000		0,00%
1	1	0	5	0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.685.000		0,00%
1	1	0	6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.600.775.956	146.086.175	9,13%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	1	0	6	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.079.000		0,00%
1	1	0	6	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.189.000		0,00%
1	1	0	6	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	355.243.520	35.320.445	9,94%
1	1	0	6	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.500.000	3.500.000	4,83%
1	1	0	6	0	7	Penyediaan Bahan/Material	200.000.000	34.715.805	17,36%
1	1	0	6	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	454.729.000	44.371.365	9,76%
1	1	0	6	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	419.129.000	28.178.560	6,72%
1	1	0	6	0	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436		0,00%
1	1	0	7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.824.000		0,00%
1	1	0	7	0	5	Pengadaan Mebel	38.824.000		0,00%
1	1	0	7	0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.000.000		0,00%
1	1	0	8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.723.846.320	1.302.000	0,03%
1	1	0	8	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400	240.000	0,66%
1	1	0	8	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780.000.000		0,00%
1	1	0	8	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.907.280.920	1.000.000	0,03%
1	1	0	9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.820.000	18.744.979	6,23%
1	1	0	9	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000	18.719.979	7,90%
1	1	0	9	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000	25.000	0,06%
1	1	0	9	0	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000		0,00%
0	2					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	763.446.432.137	227.440.300	0,03%
2	2	0	1			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	11.036.154.325	130.507.500	1,18%
2	2	0	1	0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	473.651.000		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	1	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	516.447.000		0,00%
2	2	0	1	0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	159.014.000		0,00%
2	2	0	1	0	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	367.722.800		0,00%
2	2	0	1	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.049.323.362		0,00%
2	2	0	1	0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.025.873.200		0,00%
2	2	0	1	0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3.444.122.963		0,00%
2	2	0	2			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.272.027.005	880.000	0,04%
2	2	0	2	0	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.038.000		0,00%
2	2	0	2	0	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.568.000		0,00%
2	2	0	2	0	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	452.694.000		0,00%
2	2	0	2	0	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	732.006.500		0,00%
2	2	0	2	0	6	sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	1.000.000		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	2	0	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	110.170.000		0,00%
2	2	0	2	0	8	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	9	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000		0,00%
2	2	0	2	0	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	101.550.505	8.589.000	8,46%
2	2	0	3			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.382.903.796	39.768.800	1,67%
2	2	0	3	0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	433.044.296	7.626.800	1,76%
2	2	0	3	0	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	322.607.600		0,00%
2	2	0	3	0	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	404.848.400		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
						Lainnya			
2	2	0	3	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	631.832.200	32.142.000	5,09%
2	2	0	3	0	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	589.571.300		0,00%
2	2	0	4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.671.638.502	56.284.000	2,11%
2	2	0	4	0	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1.000.000		0,00%
2	2	0	4	0	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	330.735.212	48.309.000	14,61%
2	2	0	4	0	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	560.726.990		0,00%
2	2	0	4	0	4	konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	770.670.000		0,00%
2	2	0	4	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.006.506.300		0,00%
2	2	0	4	0	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1.000.000		0,00%

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
2	2	0	4	0	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	1.000.000		0,00%
2	2	0	5			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	745.083.708.509		0,00%
2	2	0	5	0	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	47.206.923.484		0,00%
2	2	0	5	0	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	46.356.898.400		0,00%
2	2	0	5	0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	22.180.954.686		0,00%
2	2	0	5	0	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	629.338.931.939		0,00%

Sumber : SPJ Belanja – Fungsional Januari 2025

B. Kinerja Badan Keuangan Daerah berdasarkan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Sampai dengan 31 Januari 2025, hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari 13 kegiatan dan 74 sub kegiatan dimana setiap kegiatan dan sub kegiatan terbagi dalam 2 (dua) program, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini secara teknis menjadi tanggungjawab Sekretariat Badan Keuangan Daerah adapun Pagu sebesar Rp. 18.188.331.972,- Terealisasi sebesar Rp. 242.993.454,- dengan presentase (1,34%);

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD

Sub Bagian PDE bertanggungjawab untuk menangani kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah, dan Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah. Pagu sebesar Rp. 409.894.096,- Realisasi sebesar Rp. 13.280.000,- (3,24%).Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2023 .
- ⇒ Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- ⇒ Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- ⇒ Terlaksananya Pelaporan Realisasi Keuangan dann fisik serta monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target RPSMD secara tahunan, pencapaian renstra secara tahunan,dan target indikator secara bulanan dan triwulan kepada Bapperida melalui aplikasi e. Monev performance.
- ⇒ Terlaksananya Beberapa fungsi dari pimpinan berupa:
 - a) Penyusunan materi rapat.
 - b) Mewakili pimpinan untuk mengikuti rapat maupun kegiatan lainnya.
 - c) Tugas-Tugas Lainnya.

b. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Pagu sebesar Rp. 11.562.328.600,- Realisasi Rp. 40.822.500 (0,35%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan.

- ⇒ Terjawabnya temuan Inspektur Jenderal.
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Pejabat Pengelola Keuangan kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
- ⇒ SPP/SPM-GU kepada pengguna Anggaran.
- ⇒ SPP/SPM-GU kepada BUD.
- ⇒ SPJ fungsional kepada PPK SKPD untuk divirifikasi.
- ⇒ SPJ Administrasi kepada PPK SKPD untuk divirifikasi.
- ⇒ Pengisian buku cek dan pengembalian tunai uang kas di Bank .
- ⇒ Menerima dan menyimpan uang persediaan .
- ⇒ Membukukan penyeteroran atas pungutan Pajak.
- ⇒ Membuat rekapitulasi data realisasi belanja bunga, belanja DBH, bantuan keuangan dan BTT.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 20.000.000,- Realisasi Rp 4.264.000,- (21,32%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah.
- ⇒ Tersusunnya rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pagu sebesar Rp. 335.843.000,- Realisasi Rp. 18.555.800,- (5,53%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Budaya Kerja.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Kenaikan Pangkat.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Pensiun.
- ⇒ Tersusunnya Laporan Presentasi Kehadiran.
- ⇒ Pengusulan Pensiun.
- ⇒ Penyusunan Laporan Implementasi SPBE Tahun 2023.
- ⇒ Pengusulan Kenaikan Pangkat .
- ⇒ Penginputan Anjab ABK Tahun 2025 Pada Aplikasi Sinjab 3.8.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Umum PD yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 1.600.775.956,- Realisasi Rp. 146.086.175,- (9,13%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersedianya Peralatan Rumah Tangga.
- ⇒ Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
- ⇒ Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- ⇒ Tersedianya Bahan/Material.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu sebesar Rp. 234.824.000,- Realisasi Rp.0,- (0%).

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi. Pagu sebesar Rp. 3.723.846.320,- Realisasi Rp. 1.302.000,- (0,03%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan: ⇒ Tersedianya Jasa Surat Menyurat.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pagu sebesar Rp 300.820.000,- Realisasi Rp. 18.744.979,- (6,23). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan : ⇒ Tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ditangani oleh 4 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dari pagu sebesar Rp. 763.446.432.137,- Realisasi Rp. 227.440.300,- Presentase (0,03%). Berikut adalah realisasi kinerja per kegiatan :

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dengan Pagu sebesar Rp. 11.036.154.325,- Realisasi Rp. 130.507.500,- (1,18%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA-PPAS serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD serta Perubahannya;
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD serta Perubahannya;
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD serta Perubahannya;
5. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
6. Penyusunan Petunjuk Teknis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Menginventarisir pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Tabel 3.10

**Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
Kondisi 31 Januari 2025**

Program	Rincian Kegiatan	Target (dokumen/kegiatan /buku)	Realisasi (dokumen/kegiatan /buku)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi penyusunan dan verifikasi Dokumen DPA-SKPD TA. 2025	- Proses Stemple dan Distribusi Dokumen DPA-SKPD TA. 2025	Dokumen DPA-SKPD TA. 2025	Terealisasi
		- Rapat dalam rangka penyerahan DPA-SKPD TA. 2025	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
	2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Rapat Pembahasan terkait Penyesuaian kembali terhadap target PAD Tahun Anggaran 2025	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Pelaksanaan DAU Spesifik Grant Tahun 2024	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
	3. Koordinasi dan Penyusunan	- Proses Pencetakan Dokumen Peraturan Daerah	Dokumen Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun	Terealisasi

	Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Nomor 6 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025	2024 tentang APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025	
		- Proses Pencetakan Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025	Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025	Terealisasi

b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp 2.272.027.005,- Realisasi Rp. 880.000,- (0,04%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11

**Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan Keuangan
Daerah Kondisi 31 Januari 2025**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /RINCIAN KERJA	BENTUK/ WUJUD	REALISASI	KETERANGAN
PROGRAM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
KEGIATAN : PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
A.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota TA 2025 Nomor 900.1./241/BLKUD5 Tanggal 4 Februari 2025 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota TA 2025	Terinformasinya Laporan Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota TA 2025	
	2. Penyampaian surat Nomor 900.1.1/202/BKUD5 Tanggal 30 Januari 2025	Surat Nomor 900.1.1/202/BKUD 5 Tanggal 30	Terinformasinya Penegasan Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun	

	ke para Bupati dan Walikota hal Penegasan Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025	Januari 2025 ke para Bupati dan Walikota hal Penegasan Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025	2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025	
B.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			
C.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			

D.	Sub kegiatan : Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatannya yaitu Rapat Koordinasi Keuangan Daerah			
E.	Sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Program Pengelolaan Keuangan daerah dengan rincian kegiatan Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota	List rekapan LRA Kabupaten/Kota keadaan sampai dengan 31 Januari 2025 sebanyak 1 (satu) dokumen	1 (satu) list rekapan LRA Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kemendagri, Bank Indonesia dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTT serta Kantor DJP Pajak Pratama	Berlanjut untuk bulan Februari Tahun 2025 yang akan dilaporkan di bulan Maret Tahun 2025
	2. Menyusun Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022	Draf daftar/list Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023	Draf data Statistik Keuangan Daerah Tahun 2023	Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya
F.	Sub kegiatan : Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			
	1. Menyusun administrasi			

	dalam rangka pelaksanaan FGD E-BLUD seperti : ➤ Kerangka Acuan Pelaksanaan FGD Pengelolaan Keuangan daerah berbasis E-BLUD. ➤ Surat undangan ke parah Bupati/Walikota ➤ Surat permintaan Narasumber yang di tujukan kepada parah pejabat dari direktorat BUMD, BLUD dan BMD Direktorat Jendaeral Bina Keuangan Daerah Kemendagri bersama tim teknis e-BLUD Universitas Indonesia dan Plt Kepala Biro Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. ➤ Surat Permintaan Tenaga Teknis dari Dinas Kominfor Provinsi NTT. 2. Pelaksanaan kegiatan FGD pengelolaan keuangan berbasis elektronik BLUD			
G.	Asistensi Pengelolaan Keuangan DBH-CHT			

	Kab/Kota			
	1. Penyampaian Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.1/344/BKUD5.2 Tanggal 17 Februari 2025 hal Permintaan Data Salur DBH CHT TA 2024 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Perimbangan Keuangan RI	Surat Permintaan Data salur DBH-CHT Tahun Anggaran 2024 Nomor900.1/344/BKUD5.2 Tanggal 17 Februari 2025 hal Permintaan Data Salur DBH CHT TA 2024	Terinformasinya data salur DBH CHT TA 2024	
	2. Penyampain Surat Gubernur NTT Nomor 900.1/150/BKUD5.2 Tanggal 21 Januari 2025 Hal data capain kinerja pemerintah provinsi NTT di Bidang Penegakkan Hukum DBH CHT Tahun 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBD Bali, NTB dan NTT di Denpasar	Surat Gubernur NTT Nomor 900.1/150/BKUD5.2 Tanggal 21 Januari 2025 Hal data capain kinerja pemerintah provinsi NTT di Bidang Penegakkan Hukum DBH CHT Tahun 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBD Bali, NTB dan NTT di Denpasar	Terinformasinya data capain kinerja pemerintah provinsi NTT di Bidang Penegakkan Hukum DBH CHT Tahun 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBD Bali, NTB dan NTT di Denpasar	
	3. Penyampaian surat Gubernur NTT Nomor 900.1.14/179/BKUD5.2 Tanggal 23 Januari 2025 hal Permintaan Rencana Kegiatan dan	surat Gubernur NTT Nomor 900.1.14/179/BKU D5.2 Tanggal 23 Januari 2025 hal Permintaan	Tersedianya data Rencana Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT Kabupaten/Kota se Provinsi NTT TA 2025	

	Penganggaran DBH CHT Kabupaten/Kota se Provinsi NTT TA 2025 yang ditujukan kepada para Bupati dan Walikota se- NTT	Rencana Kegiatan dan Penganggaran DBH CHT Kabupaten/Kota se Provinsi NTT TA 2025		
	4. Penyampaian laporan Realisasi Pemanfaatan DBH-CHT Provinsi NTT semester II TA 2024 yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan RI Nomor 900.1/188/B.KUD5.2 Tanggal 24 Januari 2025	laporan Realisasi Pemanfaatan DBH-CHT Provinsi NTT semester II TA 2024 yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan RI Nomor 900.1/188/B.KUD5.2 Tanggal 24 Januari 2025	Terinformasinya laporan Realisasi Pemanfaatan DBH-CHT Provinsi NTT semester II TA 2024 yang ditujukan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan RI Nomor 900.1/188/B.KUD5.2 Tanggal 24 Januari 2025	
H.	Sub kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	Laporan Kinerja Tahun 2024 Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	Terinformasinya Laporan Kinerja Tahun 2024 Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan tahun 2024	
	2. Penyusunan laporan kegiatan bulan Desember	Laporan kegiatan bulan Desember 2024	Disampaikannya laporan kegiatan bidang pembinaan kab/kota	Penyusunan laporan kegiatan bulan Desember

	2024		bulan Januari 2025 kepada Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	2024
	3. Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Malaka	Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Malaka terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	Terinformasinya berbagai hal terkait Pengelolaan Keuangan Daerah baik dari sisi Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Konsultasi dari BPPKAD Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Malaka
I.	Tugas Tambahan : Melaksanakan tugas sebagai Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rincian :			
	1. Penyelesaian administrasi umum dan kepegawaian (Kenaikan Berkala, SKP Tahun 2024 maupun SKP Tahun 2025)	Dokumen SKP, Kenaikan Berkala dan SKP 2024	Tersedianya 3 jenis dokumen untuk ditindaklanjuti secara berkala	

c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Perbendaharaan dengan Pagu sebesar Rp. 2.382.903.796,- Realisasi Rp. 39.768.800,- (1,67%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

1. Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

Realisasi Penerimaan sebesar Rp.3.847.547.492.021 sedangkan Realisasi Pengeluaran sebesar Rp.3.383.945.359.701,- dan sisa saldo RKUD per 31 Januari 2025 sebesar Rp.463.602.132.320.

2. Realisasi Keuangan khusus Bidang Perbendaharaan dengan anggaran sebesar Rp.2.400.003.796,- terealisasi sebesar

Rp. 1.858.003.721,- atau 77% yang terdiri dari :

- Sub Kegiatan 5.02.02.1.03.03.01 Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah terealisasi Rp.338.705.804,- atau 80% dari anggaran sebesar Rp.424.559.796,-
- Sub Kegiatan 5.02.02.1.03.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD terealisasi sebesar Rp.244.070.138,- atau 76% dari anggaran Rp.322.083.000,-
- Sub Kegiatan 5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya terealisasi Rp. 312.927.390,- atau 81% dari Anggaran sebesar Rp.385.216.000,-
- Sub Kegiatan 5.02.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sebesar Rp.496.667.090,- atau 75% dari Anggaran sebesar Rp.665.180.000,-
- Sub Kegiatan 5.02.02. 1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas terealisasi Rp.465.633.299,- atau 79% dari Anggaran sebesar Rp.592.965.000,-

Tabel 3.12

**Hasil Pelaksanaan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah
Kondisi 31 Januari 2025**

PROGRAM	KEGIATAN	BENTUK/WUJUD	REALISASI	KET
Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Menerima, memverifikasi dan memproses SPP/SPM dari Perangkat Daerah (PD) Lingkup	Belanja Daerah Terdiri Dari SP2D : 1.083 Doc LS Gaji PNSD 26 Doc & Guru (Gaji Induk) LS Terusan gaji 17 Doc	

		Pemprov. NTT dan selanjutnya diproses menjadi SP2D.	LS Susulan Gaji 3 Doc LS Kekurangan Gaji 2 Doc LS Kekurangan THR LS TPP Purna Bhakti 5 Doc LS Gaji PPPK 1 Doc LS DPRD 1 Doc LS TPP PPPK 17 Doc GU 73 Doc LS TPP 346 Doc LS Susulan TPP 8 Doc LS Gaji Honorer 57 Doc LS Susulan Honorer 2 Doc LS TPG 5 Doc LS TPG PPPK 2 Doc LS TKG 2 Doc LS TKG PPPK 2 Doc LS Tamsil Guru 6 Doc LS Belanja Barang Jasa 204 Doc LS Belanja Modal 299 Doc LS Belanja Transfer 5 Doc	
		Membuat Laporan Bulanan tentang : - Data Belanja Gaji Pegawai dan TPP Bulan	Surat Pengantar : 1. 900.1.3/2626/BKUD3.1	

		Oktober Tahun Anggaran 2024 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) - Data Belanja Gaji PPPK dan TPP Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Ke Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)	Tgl. 11 November 2024	
		Membuat SKPP (Pensiun BUP, Pensiun Dini, Janda Duda dan Pindah)	SKPP BUP Doc : 61 SK SKPP : 8 SK Meninggal SKPP Pindah : 1 SK Pensiun Dini : - SK	
		Menginput Perubahan data Gaji PNSD dan Guru SMA/SMK	Perubahan Gaji, Berkala/Naik Pangkat: PNS : 249 Orang Guru : 282 Orang	

		se Prov. NTT	PPPK Tahap I : 12 Orang PPPK Tahap II : 1.394Orang PPPK PI : 15 Orang	
		Pembayaran Gaji Rutin Bulanan bagi PNS Lingkup Pemprov. NTT TA. 2024	- Verifikasi berkas - Penginputan data dalam Aplikasi SIM Gaji Taspen - Pencetakan Daftar Gaji - Pencetakan SP2D - Realisasi Pembayaran	
		Mengentri Buku Bantu Rekening Kas Daerah Provinsi NTT	Penerimaan : 5.938 Doc Pengeluaran : 1.083 Doc	
		Menginput Data Bukti Setoran dan SP2D dalam B IX	5.938 Doc	
		Melakukan Rekapitulasi dan penyetoran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), yang terdiri dari beras, Taspen, Iuran Kesehatan, Iuran Ketenaga kerjaan, PPh Ps. 21, Taperum, PPN dan PPh Ps. 22	PNS pada 35 OPD Lingkup Pemprov. NTT, OPD Pengalihan 3 Kab/Kota dan Guru SMA/SMK Pengalihan 22 Kab/Kota	
		Melakukan rekapitulasi pemotongan dan penyetoran terhadap kredit Kendaraan Roda 2 dan 4 ke kas	3 OPD dan 3 Bukti Setoran	

		daerah		
		Melakukan verifikasi terhadap SP2D yang akan dilakukan pencairan	1.083 SP2D	
		Melakukan pengiriman Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Bulan November 2024 ke KPP Pratama Kupang	Surat Pengantar Nomor : 900.1.13.1/2953/BKUD3.1 Tanggal 16 Desember 2024	
		Melakukan Pengiriman Daftar Rekapitulasi, bukti billing iuran wajib pegawai dan bukti billing iuran asuransi kesehatan bulan Desember 2024	Surat Pengantar Nomor : 1. 900.1/2846/BKUD3.3 2. 900.1/2847/BKUD3.3 Tgl . 04 Desember 2024	
	Pengagendaan Surat	Surat Masuk Surat Keluar	Total = 145 Surat Total = 18 Surat	
		Melakukan pengiriman bukti pembayaran beras ke Bulog Bulan September 2024	33 Setoran	
		Rekapitulasi LHP	LHP BPK RI (29 kasus)	

		BPK RI dan Inspektorat Daerah Prov. NTT Keadaan Desember 2024	Nominal Rp. 149.409.137,- LHP Inspektorat Daerah Prov. NTT (749 kasus) Nominal Rp. 7.477.510.227,- Rincian terlampir	
		Penginputan perubahan gaji tanggal 1-10 setiap bulannya pada SIM Gaji Web	Tepat waktu	
		Operator pada Aplikasi Gaji melakukan Print daftar gaji	Untuk dibayarkan pada gaji bulan Januari	
		Pelaporan DAU harus di upload melalui aplikasi SINERGI (sofcopy & hardcopy) yang sudah ditandatangani dan cap basah oleh pejabat yang berwenang, pengiriman paling lambat tanggal 14 setiap bulannya. Apabila tidak dipenuhi maka penyampaian DAU bulan berikutnya di tunda	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak pernah terlambat menyampaikan laporan DAU	

		Penyusunan Laporan Progres Penyerapan Dana Pinjaman Ekonomi (PEN) Daerah antara PT. SMI dan Pemprov. NTT yang dikirim paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya dan laporan tersebut harus terlebih dahulu sudah di reviu oleh Inspektorat daerah sebelum dikirim ke PT. SMI melalui aplikasi REVINA	Selalu tepat waktu	
	Pembinaan Bendahara	Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang: Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Sekolah Baru Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri pada Anggaran	Nomor : 900/BKUD3/2024 Tanggal 9 Desember 2024	

		Pendapatan dan Belanja Daerah Prov. NTT Tahun Anggaran 2024		
--	--	---	--	--

d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Pagu sebesar Rp. 2.671.638.502,- Realisasi Rp 56.284.000,- (2,11%) . Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

1. DAP Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2025

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari sub – sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran kas Daerah dengan jumlah anggaran senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 terealisasi senilai Rp. 0,00,- atau 0 %
- b. Sub kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo, dan beban jumlah anggaran sebesar Rp. 330.735.212,- sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 terealisasi Rp.48.309.000,- atau (14.61%).
- c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.560.726.990,- dan sampai dengan 31 Januari 2025 realisasi Sebesar Rp.0,00,- Atau (0%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
- d. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 770.670.000,- sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 terealisasi sebesar Rp.0,00,- atau (0%).
 ⇒ Tersusunnya Laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 (Unaudited).

- ⇒ Tersusunnya laporan keuangan SKPD TA.2023 (Unaudited).
 - ⇒ Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023 (Audited).
 - ⇒ Tersusunnya Laporan keuangan SKPD TA.2023(Audited)
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, dianggarkan sebesar Rp.1.006.506.300,- dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 sebesar Rp.0,00,- atau 0% Hasil (ouput) pelaksanaan kegiatan:
- ⇒ Tersusunnya Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi NTT TA.2023.
 - ⇒ Tersusunnya rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi NTT TA.2023.
 - ⇒ Tersusunnya Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023.
 - ⇒ Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023.
- f. Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan paduan teknis oprasional penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan 31 Januari 2025 realisasi Sebesar Rp.0,00,- Atau 0% Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :
- g. Sub Kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi dengan jumlah anggaran senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan 31 Januari 2025 realisasi Sebesar Rp.0,00,- Atau 0% .

Tabel 3.13
Realisasi Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Kondisi per 31 Januari 2025

Program	Rincina Kegiatan	Target (dokumen/ kegiatan)	Realisasi (dokumen/ kegiatan)	Ket
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	1. Sub kegiatan Kooordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.	1 Laporan		
	2. Sub kegiatan rekonseliasi dan ferifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan.p endapata-lo, dan Beban	3 Dokumen		
	3. Sub kegiatan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan semesteran .	3 Dokumen 1.Laporan Bulanan. 2.Laporan Triwulan. 3.Laporan semester.		
	4. Sub kegiatan konsolidasi laporan keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Dokumen 1. 35 Lk SKPD 2. 4 Lk BUMD 3. 1 LKPD		

Program	Rincina Kegiatan	Target (dokumen/ kegiatan)	Realisasi (dokumen/ kegiatan)	Ket
	5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT	4 Dokumen 1. Ranperda 2. Ranpergub 3. Perda 4. Pergub		
	6. Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan paduan teknis oprasional penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		
	7. Sub Kegiatan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	35 SKPD		

e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Sub Bagian Keuangan, terdiri dari Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Pagu sebesar

Rp.745.083.708.509,-Realisasi Rp.0,- (0%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Laporan hasil Analisis Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman Pemerintah daerah .
- ⇒ Laporan Hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan.
- ⇒ Laporan hasil pengelolaan darurat dan mendesak .
- ⇒ Laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Provinsi.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1 Permasalahan dan Solusi

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Permasalahan

1. Sebagian besar (bidang/sub bidang/sekretariat/sub bagian) belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sehingga terjadi keterlambatan.
2. Ketersediaan ASN yang masih terbatas.
3. Kurangnya bimtek atau diklat karena kurangnya ketersediaan dana
4. Arsip data masing-masing pegawai belum terkumpul seluruhnya. Hal ini dikarenakan pegawai yang bersangkutan belum menyerahkan arsipnya pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
5. Penanganan disiplin pegawai belum optimal. Beberapa kasus pegawai yang tidak disiplin sering kali terlambat dilaporkan, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih rumit.

b. Solusi

1. Masing-masing bidang/sub bidang/sub bagian segera menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat satu minggu setelah diminta.
2. Mengusulkan penambahan ASN untuk ditempatkan pada Sekretariat.
3. Ditambah dana untuk bimtek dan diklat untuk seluruh pegawai
4. selalu menyampaikan informasi terkait pengumpulan kelengkapan arsip data pegawai melalui Nota Dinas maupun WA grup
5. Memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pegawai yang indisipliner.
6. Atasan langsung rutin melakukan pengawasan terhadap kehadiran pegawai pada unit kerjanya, dan segera melaporkan kepada

Kasubag Kepegawaian dan Umum apabila terdapat pegawai di unitnya yang melakukan tindakan indisipliner

7. Perlu adanya penyampaian informasi dan rekomendasi dari atasan agar setiap pegawai memiliki minat dan semangat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui Bimtek maupun Diklat.

2. Bidang Anggaran

a. Permasalahan

1. Permasalahan yang dihadapi terkait Keterlambatan proses penandatanganan DPA SKPD sehingga Mengakibatkan terhambatnya Proses Percetakan DPA dan Mengalami Keterlambatan untuk dilakukan Penyerahan DPA SKPD Tahun 2025 oleh Penjabat Gubernur kepada Pimpinan SKPD;
2. Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b. Solusi

1. Menindaklanjuti Permasalahan diatas, Langkah-langkah yang dilakukan Tim Kerja Bidang Anggaran selalu berkoordinasi dengan SKPD agar melakukan percepatan penandatanganan DPA SKPD untuk proses cetak dan diserahkan pada SKPD;
2. Terhadap permasalahan sebagaimana Huruf a Point 2 di atas dilakukan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga disiapkan konsep/skema penyesuaian/pergeseran terhadap APBD.

3. Bidang Perbendaharaan

a. Permasalahan

1. OPD tidak tepat waktu menyampaikan SPP/SPM LS-Barang dan Jasa yang mengakibatkan terjadi penumpukan dokumen di akhir tahun dan tidak efektif proses penerbitan SP2D.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlambat penyaluran TPP April – November sehingga pembayaran TPP dilakukan bersamaan dengan TPP Desember.
3. Terdapat OPD yang belum maksimal memanfaatkan penggunaan CMS Bank NTT

b. Solusi

1. Bidang Perbendaharaan telah menyelesaikan SPP/SPM LS-Barang Jasa yang diajukan oleh OPD menjadi SP2D dan proses transfer selesai ditanggal 30 Desember 2024.
2. Bidang Perbendaharaan telah melakukan pembayaran TPP guru-guru tuntas sampai TPP Desember 2024.
3. Bidang Perbendaharaan melakukan pembinaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta Monitoring dan Evaluasi Aplikasi CMS pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Prov. Nusa Tenggara Timur.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Permasalahan

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Akuntansidan Pelaporan permasalahan yang terjadi adalah penyerapan anggaran per 31 Desember 2025 untuk bidang akuntansi dan pelaporan sudah riil, mengikuti schedule/waktu pelaksanaan program/kegiatan.

5. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

a. Permasalahan

1. Belum tepat waktu Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2024.

2. Belum tepat waktunya Kab/Kota menyampaikan RKP DBH-CHT TA.

b. Solusi

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap bulan sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.
2. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultatif yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyusun dan menyampaikan RKP DBH- CHT TA 2025 bagi kabupaten yang belum menyampaikan.

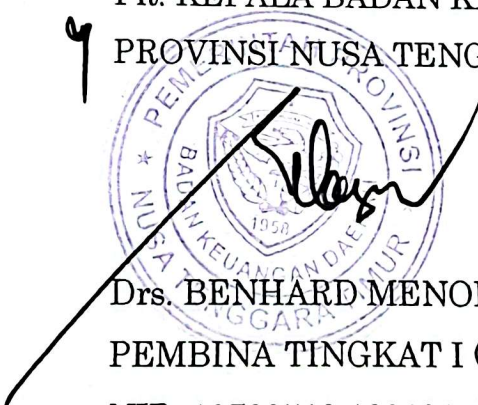
BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Bulan Januari Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah ini disusun, sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada lingkup Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025. Hal-hal lain yang belum dimuat dalam panduan ini akan dibahas saat evaluasi berlangsung.

Kupang, Februari 2025

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

9 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, f


Drs. BENHARD MENO, MT

PEMBINA TINGKAT I (IV/B)

NIP. 19720512 199101 1 001